

URGENSI IZIN BELAJAR BAGI PNS YANG AKAN KULIAH (Studi Kasus di SMPN 1 Moro Kab. Karimun)

Nurazyu Kurniawan¹, Muhammad Arief Noor², Abdul Kohar³, Arik Siswanto⁴, Alip Farhan⁵

¹⁻⁵ STIE Ganesha

azyu.kiut@gmail.com

Abstract

This study uses a descriptive qualitative approach, where researchers are the key instrument. The data collected were obtained from observations, interviews, and documentation. The data analysis technique used is triangulation, with the addition of several relevant sources. This study discusses the urgency of study permits for civil servants who will study. This phenomenon involves several civil servants who face obstacles in managing promotion through the diploma adjustment route due to not having a study permit issued by the Karimun Regency BKPSDM. The Regent of Karimun has issued a circular explaining the procedure for obtaining study permits for civil servants who will study. However, there are still civil servants who do not comply with these regulations and choose to continue studying without having a study permit. This phenomenon also occurs at SMPN 1 Moro, where several civil servants who have finished college but experience problems in the process of managing promotion through the diploma adjustment route. Based on this background, this study aims to explore the reasons behind the decision of civil servants to continue studying even without a study permit. From the results of the study, it was obtained that the lack of information regarding study permits and the issuance of Law number 14 of 2005 caused civil servants at SMPN 1 Moro to continue studying even without a study permit. The distance and topography separated by the ocean are also the reasons why civil servants at SMPN 1 Moro do not take care of study permits until completion. It was also found that the impact felt by civil servants at SMPN 1 Moro was not only an obstacle in class promotion, but also had an impact on periodic salary increases.

Received: 10 Juni 2023

Revised: 15 July 2023

Accepted: 07 August 2023

Published online: 07 August 2023

Keywords: mere permits, civil servants study

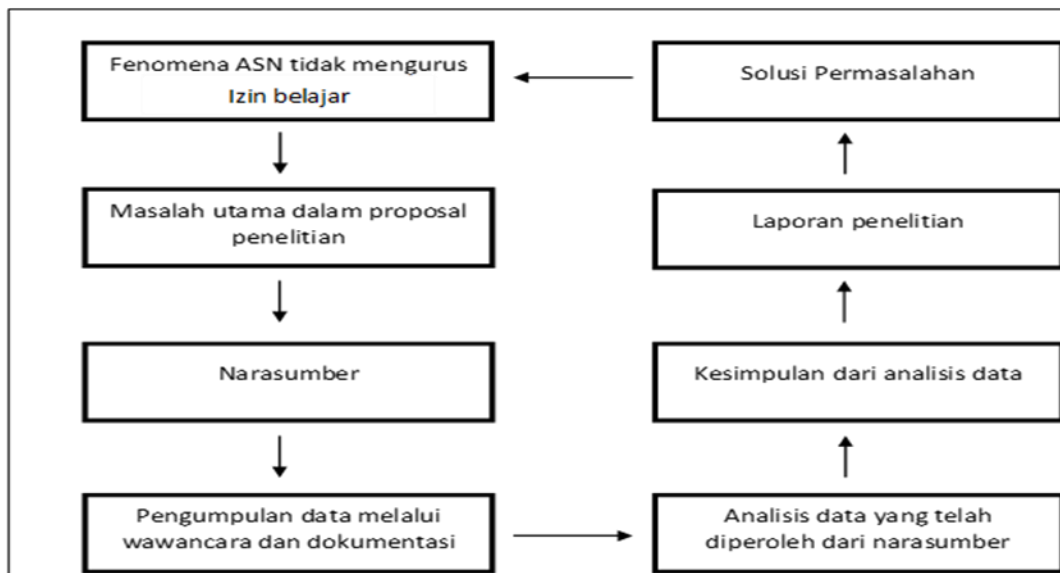
PENDAHULUAN

Dalam UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN), dijelaskan pentingnya integritas, profesionalisme, netralitas, dan kebebasan dari campur tangan politik bagi ASN (Sulaiman & Khoiri, 2023). UU ini merupakan hasil perubahan dari UU sebelumnya dan juga mengatur kenaikan pangkat PNS berdasarkan kompetensi (Sulistiana, 2013). Pemerintah RI menjelaskan bahwa pangkat dalam kepegawaian mencerminkan posisi PNS dalam hierarki dan berpengaruh pada gaji. Salah satu syarat kenaikan pangkat adalah memiliki ijazah. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya surat keterangan izin belajar. Bupati Karimun telah mengeluarkan prosedur pengembangan kompetensi PNS melalui izin belajar. Beberapa PNS memiliki ijazah yang sesuai dengan pekerjaan mereka namun tidak memiliki izin belajar, menghambat kenaikan pangkat dan kinerja mereka. Pengurusan izin belajar tidak sulit jika memenuhi persyaratan administrasi (Rahmadhan et al., 2013). Meskipun informasi izin belajar telah disampaikan, masih ada PNS yang tidak mematuhi, yang merugikan mereka secara administrasi, waktu, dan finansial. Penelitian dilakukan untuk memahami alasan di balik keputusan PNS ini (Dominata et al., 2019).

Fokus penelitian ini adalah mengungkap alasan mengapa PNS di SMPN 1 Moro tidak mengurus izin belajar saat memulai pendidikan di perguruan tinggi, sementara izin belajar menjadi persyaratan krusial dalam upaya peningkatan kompetensi mereka (Susilowati, 2016). Tujuan penelitian mencakup penilaian pemahaman PNS tentang fungsi dan prosedur izin belajar, identifikasi kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin, analisis penyebab terhentinya upaya pengurusan izin, penyelidikan alasan PNS melanjutkan kuliah tanpa izin belajar, serta penilaian dampak yang dirasakan setelah wisuda oleh PNS di SMPN 1 Moro (Salina & Heriyanto, 2021).

Penelitian ini berfokus pada alasan utama PNS yang melanjutkan pendidikan tinggi tanpa melengkapi syarat administrasi kepegawaian berupa surat izin belajar, sebuah area yang belum banyak diteliti sebelumnya. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa belum ada model penelitian yang secara khusus memfokuskan pada aspek ini, mendorong peneliti untuk menjadikan urgensi izin belajar bagi PNS yang mengejar pendidikan tinggi sebagai judul penelitian (Sumiyati et al., 2019). Meskipun ada beberapa jurnal yang membahas izin belajar dan administrasi kepegawaian bagi PNS dalam konteks pengembangan karir dan pengurusan kenaikan pangkat, namun tidak satupun yang secara spesifik mengungkap mengapa sebagian PNS memutuskan untuk melanjutkan kuliah tanpa izin belajar resmi dari BKPSDM dalam delapan jurnal penelitian terdahulu yang diacu dalam penelitian ini (Sulistiana, 2013).

Alur Fikir Penelitian



METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat mendalam dan holistik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena dengan cermat tanpa memisahkan aspek-aspeknya. Penelitian dilakukan di SMPN 1 Moro, dengan fokus pada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi tetapi tidak memiliki izin belajar. Permasalahan yang dihadapi oleh PNS terkait dengan pengakuan ijazah untuk kenaikan pangkat dan penghitungan angka kredit di SKP (Soleha, 2018). Waktu pelaksanaan penelitian tidak terjadwal tetapi bersifat fleksibel, mengikuti kondisi dan situasi narasumber. Ini memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara secara spontan, dimanapun dan kapanpun narasumber bersedia. Instrumen penelitian utamanya adalah peneliti sendiri, dengan tambahan pedoman wawancara, alat perekam wawancara, dan alat dokumentasi seperti kamera foto dan video. Informan penelitian adalah PNS di SMPN 1 Moro yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa izin belajar. Jumlah informan akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Prosedur pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara mendalam, FGD, dan pengumpulan dokumen. Data wawancara akan diubah menjadi

transkrip wawancara untuk analisis lebih lanjut. Analisis data melibatkan persiapan data, transkripsi wawancara, dan triangulasi untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh (Fadli, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Moro, salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. SMPN 1 Moro merupakan salah satu sekolah tertua dan terbesar di Kabupaten Karimun, dengan jumlah siswa mencapai 510 orang dan 17 kelas. Sekolah ini juga memiliki 31 guru dan 10 staf tata usaha, yang terdiri dari PNS, PPPK, dan Honor Kontrak, sehingga total pegawai di SMPN 1 Moro berjumlah 41 orang. Masa kerja para pegawai bervariasi, ada yang kurang dari 10 tahun dan ada yang lebih dari 25 tahun, memberikan mereka pengalaman kepegawaian yang beragam.

Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Ibuk Supini, seorang guru senior yang mengajar matematika di SMPN 1 Moro. Meskipun memiliki gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd), dia terhambat dalam kenaikan pangkatnya karena tidak memiliki izin belajar saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kurang Sempurnanya Informasi Awal Mengenai Izin Belajar

Pada awalnya, PNS di SMPN 1 Moro memiliki sedikit informasi tentang fungsi dan kegunaan izin belajar. Mereka hanya mengetahui bahwa izin belajar diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk melanjutkan kuliah. Namun, informasi ini terbilang minim dan tidak cukup jelas. Ibuk Supini, sebagai narasumber utama, mengungkapkan ketidapahamannya mengenai izin belajar pada awalnya. Setelah berhasil memperoleh ijazah D3 dan berencana melanjutkan proses pemberkasan untuk kenaikan pangkat dengan penyesuaian ijazah, Ibu Supini baru memahami sepenuhnya fungsi dan kegunaan izin belajar. Ia menyadari bahwa izin belajar sangat penting sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagai persyaratan kenaikan pangkat (Sulistiana, 2013).

PNS Wajib Datang Langsung untuk Pengurusan Izin Belajar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan PNS dalam pengurusan izin belajar. Namun, para PNS diharuskan datang langsung ke kantor dinas tersebut untuk melengkapi persyaratan administrasi. Tidak ada kemungkinan untuk mewakilkan atau menitipkan pengurusan izin belajar kepada orang lain. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa PNS memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk menghindari potensi penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Sulistiana, 2013).

Pengaruh Gelombang Laut Tinggi Terhadap Pengurusan Izin Belajar

Kabupaten Karimun memiliki topografi yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Akses antar pulau hanya dapat dilakukan dengan transportasi laut, seperti speedboat. Namun, cuaca buruk dan gelombang tinggi dapat menghambat perjalanan lintas laut. Penggunaan transportasi laut menjadi satu-satunya pilihan bagi PNS seperti Ibuk Supini yang berada di pulau Moro dan harus pergi ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun di pulau Karimun untuk mengurus izin belajar. Cuaca buruk dan gelombang tinggi dapat membuat perjalanan ini tidak mungkin dilakukan (Rahmi, 2023).

Persyaratan Administrasi yang Rumit dan Pengaruhnya Terhadap Pengurusan Izin Belajar

Prosedur administrasi untuk pengurusan izin belajar bagi PNS di SMPN 1 Moro memerlukan banyak persyaratan dan berkas administrasi. Hal ini membuat PNS, seperti Ibu Supini, merasa kesulitan karena harus bolak-balik antara pulau Moro dan Karimun menggunakan

transportasi laut, seperti speedboat. Persyaratan yang rumit dan lokasi pengurusan yang terpisah oleh laut membuat beberapa PNS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pengurusan izin belajar (Rabiah Al Adawiah et al., 2022).

Pengaruh UU Guru Wajib S1 Terhadap Motivasi Kuliah Tanpa Izin Belajar

Guru diwajibkan memiliki kualifikasi minimal S1 sesuai dengan Undang-Undang Guru Wajib S1. Hal ini mendorong PNS seperti Ibuk Supini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, meskipun tanpa izin belajar. Kewajiban ini dianggap lebih penting daripada masalah izin belajar (Sulaiman & Khoiri, 2023).

Terhentinya Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Akibat Tidak Ada Izin Belajar

Izin belajar menjadi syarat mutlak bagi PNS yang ingin memasukkan ijazahnya sebagai syarat kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah. Tidak memiliki izin belajar berarti ijazah yang diperoleh saat kuliah tidak dapat digunakan sebagai syarat administrasi kenaikan pangkat. Ini berdampak pada terhentinya proses kenaikan pangkat golongan dan gaji berkala. PNS, seperti Ibu Supini, merasa terhambat dalam pengembangan karier mereka karena masalah izin belajar ini (Salina & Heriyanto, 2021).

Demikianlah hasil penelitian ini membahas berbagai aspek terkait izin belajar bagi PNS di SMPN 1 Moro, dengan fokus pada pengaruh kurangnya informasi, persyaratan administrasi yang rumit, kendala transportasi laut, dan konsekuensi terhentinya kenaikan pangkat dan gaji berkala. Sebagai rekomendasi, perlu ditingkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai izin belajar, serta upaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi agar lebih mudah diakses oleh PNS yang berada di lokasi terpencil. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan PNS untuk mengurus izin belajar secara online atau mewakili pengurusan kepada pihak yang terpercaya untuk mengatasi kendala transportasi laut yang seringkali tidak dapat diprediksi (Rahmi, 2022).

KESIMPULAN

Hasil penelitian kualitatif ini mengungkap beberapa kesimpulan yang penting. Pertama, informasi awal yang kurang memadai mengenai izin belajar dapat menyebabkan PNS tidak menyadari pentingnya izin belajar dalam pengembangan karier mereka. Kedua, keharusan bagi PNS untuk datang langsung dan membawa persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan izin belajar bertujuan untuk memastikan keabsahan informasi serta mencegah kesalahan prosedur. Ketiga, faktor alam seperti gelombang laut tinggi dapat menjadi hambatan, terutama bagi PNS yang harus melakukan perjalanan lintas laut untuk mengurus izin belajar (Rahmi et al., 2023). Keempat, persyaratan administrasi yang kompleks dan perjalanan lintas laut menjadi hambatan serius dalam proses pengurusan izin belajar, yang dapat mempengaruhi upaya PNS untuk menyelesaikan pemberkasannya. Kelima, motivasi untuk memenuhi persyaratan UU No 14 tahun 2005 tentang kualifikasi minimal guru yang wajib S1 memberikan semangat bagi PNS untuk tetap melanjutkan kuliah meskipun tanpa izin belajar resmi. Keenam, kesimpulan utama adalah bahwa izin belajar memiliki dampak yang sangat penting terhadap proses kenaikan pangkat dan pengembangan karier PNS. Tanpa izin belajar, upaya kenaikan pangkat golongan dapat terhambat, dan kenaikan gaji berkala PNS juga dapat terpengaruh (Pemerintah RI, 2005).

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa informasi yang minim mengenai izin belajar dapat berdampak besar pada proses kenaikan pangkat golongan dan gaji berkala PNS. Oleh karena itu, pentingnya keabsahan informasi dalam prosedur pengurusan izin belajar menjadi sangat nyata. Selain itu, kondisi alam yang sulit dan persyaratan yang kompleks dapat menghentikan pengurusan

izin belajar oleh PNS yang ingin melanjutkan pendidikan. Meskipun ada UU yang mengatur kualifikasi minimal guru, masih ada PNS yang tidak memahami urgensi izin belajar.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, sejumlah saran dapat diajukan. Pertama, PNS yang ingin melanjutkan pendidikan sebaiknya mencari informasi yang akurat mengenai prosedur, persyaratan, dan tahapan yang harus dipenuhi dari sumber yang kompeten. Kedua, PNS yang mengurus pemberkasan administrasi izin belajar sebaiknya menyelesaikan seluruh tahapan secara mandiri hingga izin belajar terbit. Ketiga, PNS yang mengalami kendala dalam pengurusan izin belajar sebaiknya berkoordinasi dengan petugas yang menangani izin belajar untuk mencari solusi. Keempat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun disarankan untuk menyediakan sarana seperti link google form bagi PNS yang berasal dari luar pulau Karimun agar dapat mengurus izin belajar dengan lebih mudah. Kelima, Pemerintah Kabupaten Karimun diharapkan dapat memberikan solusi kepada PNS yang melanjutkan kuliah tanpa izin belajar, seperti pemberian penghargaan atau promosi jabatan sesuai dengan ijazah terakhir mereka, dengan syarat melaksanakan uji kelayakan dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran di APBD. Tindakan ini mencerminkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap pengorbanan waktu, tenaga, dan dana yang telah diberikan oleh para PNS. Terakhir, penelitian selanjutnya sebaiknya mendalami faktor-faktor lain yang mungkin menjadi penyebab PNS melalaikan urgensi izin belajar saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (INDONESIA, 2000).

DAFTAR PUSTAKA

- Dominata, A., Adityo, F., & Savarianti, N. (2019). *Analysis of Administration Process of Academic Degree Equivalence (PGA) for Employees at Research Center for Biotechnology, Indonesian Institute of Sciences (LIPI) during the period of 2017-2018*. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.1>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- INDONESIA, P. R. (2000). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL. *Encyclopedia of Volcanoes.*, 1995.
- Pemerintah RI. (2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Produk Hukum*.
- Rabiah Al Adawiah, Yaya Suryana, & Heri Khoiruddin. (2022). Manajemen Data Siswa Berbasis Teknologi Informasi Hubungannya Dengan Efektivitas Pelayanan Administrasi Kesiswaan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.15642/japi.2022.4.2.136-148>
- Rahmadhan, W., Aswin, M., & Wal, T. (2013). Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(2).
- Rahmi, C. (2022). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 49–61. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa>
- Rahmi, C. (2023). Memahami Ekonomi dan Keuangan Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 317–338.
- Rahmi, C., Azir, I., Chomairha, V. W., & Rachmadani, A. (2023). Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Kinerja UMKM. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 9–14. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.15242>
- Salina, I. H., & Heriyanto, M. (2021). Penerapan Kebijakan Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 14(1). <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.4047>
- Soleha, S. (2018). Persepsi Birokrat Pendidikan di Bangka Belitung Terhadap Peraturan Menteri PAN dan RB RI Tentang Izin Belajar. *Eduagama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*,



4(2). <https://doi.org/10.32923/edugama.v4i2.687>

- Sulaiman, A., & Khoiri, Q. (2023). Analisis Kebijakan Islam Pada Pendidikan Tinggi, Sertifikasi Guru Dan Dosen (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Guru Madrasah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1).
- Sulistiana, O. (2013). Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. *Jpmis*.
- Sumiyati, S., Kunlestiowati, K., Hazma, H., Susanti, I., & B, K. Y. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN STATUS TUGAS/IZIN BELAJAR DALAM PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN DAN JABATAN DOSEN PTN DI INDONESIA. *Sebatik*, 23(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.774>
- Susilowati, E. (2016). Analisis Perwali Kota Surakarta No. 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peningkatan Dan Penyesuaian Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Studi tentang Kebija. In *Enny Susilowati*.